



JOURNAL OF FEMINISM AND GENDER STUDIES

Pusat Studi Gender Universitas Jember

Volume 1, Number 2, Juli 2021

- 59-74** ROHANA KUDDUS: GENDER DAN GERAKAN SOSIAL-POLITIK
Soraya Oktarina, Heru Permana Putra
- 75-82** THE WOMENS NEED OF MEN IN DANIELLE
STEEL'S FIRST SIGHT
Yusqi Qolbi, Ikwan Setiawan, Supiastutik
- 83-110** PANDANGAN DUNIA PENGARANG DALAM NOVEL PUTRI KARYA
PUTU WIJAYA
Nur Hamidah, Endang Sri Widayati, Fitri Nura Murti
- 111-131** KONTRIBUSI ORGANISASI INDIGENOUS NASIONAL DALAM
MENGATASI MISSING AND MURDERED INDIGENOUS
WOMEN AND GIRLS(MMIWG) DI KANADA
Trianta Karana Putra, Sri Yuniati, Djoko Susilo
- 132-147** PENGARUSUTAMAAN GENDER DI JEPANG UNTUK MENCAPAI
SDG'S (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DALAM
PERSPEKTIF FEMINISME LIBERAL
Intan Dwi Masrullah, Bagus Sigit Sunarko, Agung Purwanto

Editorial Team

Editor in Chief

Dr. Linda Dwi Eriyanti, *University of Jember*, chairperson of Pusat Studi Gender

Editorial Board

Dr. Sri Nuryanti, *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*

Dr. Nurul Nurhandjati, *Universitas Indonesia*

Dr. Nikolaus Loy, *UPN Veteran Yogyakarta*

Dr. Yulianeta, M.Pd, *Universitas Pendidikan Indonesia*

Dr. Yayuk Anggraini, *Universitas Mulawarman*

Al Khanif, S.H., M.H., LL.M, Ph.D, *Universitas Jember*

Language & Copy Editor

Didik Suhariyadi, S.S., MA, Pusat Studi Gender, *University of Jember*

Zahratul Umniyah, S.Sos., M.Hum, Pusat Studi Gender, *University of Jember*

Dr. Agustina Dewi S. S.S., M.Hum, Pusat Studi Gender, *University of Jember*

Copy Editor

Soekma Yeni A, S.Sn., M.Sn, Pusat Studi Gender, *University of Jember*

Deditiani Tri Indrianti, S.Pd, M.Sc, Pusat Studi Gender, *University of Jember*

Assistant of Copy Editor

Festy Kartika Siwi, Pusat Studi Gender, *University of Jember*

Alvi Maghfiroh, Pusat Studi Gender, *University of Jember*

Rah Ayu Ning Lintang, Pusat Studi Gender, *University of Jember*

Anisyia Nurul Islamy, Pusat Studi Gender, *University of Jember*

Layout Designer

Muhammad Irfan Hilmi, S.Pd., M.Pd, *Web Designer*

Nova El Maidah, S.Si, M.Ci., *Graphic Designer*

Kontribusi Organisasi Indigenous Nasional dalam Mengatasi *Missing and Murdered Indigenous Women and Girls* (MMIWG) di Kanada

Trianta Karana Putra, Sri Yuniati, Djoko Susilo

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: riankarana@icloud.com

Abstract

The problem of missing and murdered indigenous women & girls (MMIWG) in Canada. This issue is one of the most pressing issues in Canada. MMIWG will be defined as a sociological phenomenon in which indigenous women's racial and gender identities characterize them as a marginalized group leading to increased violence, including a disproportionate rate at which indigenous women disappear and become victims of murder and sexual harassment. Using the concept of Non-Governmental Organizations (NGOs) and the concept of Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs), this study aims to determine the contribution of National Indigenous organizations in overcoming Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG) in Canada.

Keywords: *Missing And Murdered Indigenous Women & Girls (MMIWG), Human Rights, Canada, Indigenous People, Non-Governmental Organizations (NGOs)*

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi konsep yang menarik dalam studi Hubungan Internasional. HAM dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri seseorang sehingga mereka diakui keberadaanya tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, jenis kelamin, pandangan politik, kewarganegaraan, dan kekayaan.¹ Saat ini masyarakat dunia telah memiliki pedoman universal mengenai hak asasi manusia, yaitu *Universal Declaration of Human Rights*² 1948.

¹ "OHCHR | Home," accessed July 29, 2021, <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>.

² *Universal Declaration of Human Rights* merupakan sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui *General Assembly Resolution 217 A (III)* (Institute For Criminal Justice Reform, 2011).

Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi pedoman seluruh negara untuk menjamin hak setiap warga negaranya.³

Adanya pedoman *Universal Declaration of Human Rights* tidak menjamin tegaknya prinsip-prinsip HAM di sebuah negara. Pelanggaran HAM masih banyak terjadi di berbagai negara.⁴ Bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut antara lain pembunuhan massal (genosida), penyiksaan, penculikan, pemerkosaan, penahanan, dan ketidakadilan hukum. Pelanggaran HAM di beberapa negara terjadi pada penduduk suku asli (*Indigenous people*) negara tersebut.⁵ Salah satu negara yang memiliki permasalahan pelanggaran HAM terhadap masyarakat suku asli adalah Kanada. Permasalahan ini bernama *Missing and Murdered Indigenous Women and Girls* (MMIWG).

The Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG) merupakan peristiwa pembunuhan dan penculikan yang terjadi pada masyarakat suku asli di Kanada dan Amerika Serikat bagian Utara. Peristiwa ini berlangsung sejak tahun 1960-an dan masih terjadi sampai saat ini. Perjalanan panjang isu MMIWG sejak sebelum mendapat perhatian pemerintah sampai adanya respon oleh pemerintah Kanada pada tahun 2016 bukan datang dengan sendirinya. Ada pihak-pihak yang berkontribusi dalam mengatasi isu ini sehingga Pemerintah Kanada dan masyarakat internasional memberikan perhatian dan mencoba menyelesaikan permasalahan.⁶ Salah satu pihak yang berperan besar yakni organisasi-organisasi *Indigenous* nasional. Terdapat 5 organisasi *indigenous* nasional yang ada di Kanada, yakni *Assembly of First Nations* (AFN), *Congress of Aboriginal Peoples* (CAP), *Inuit Tapiriit Kanatami* (ITK), *Metis National Council* (MNC), dan *Native Women's Association of Canada* (NWAC).⁷ Organisasi-organisasi ini berperan sebagai aktor non-negara yang peduli dan ikut mengatasi permasalahan MMIWG.

Kanada merupakan salah satu negara maju di dunia. Namun, pelanggaran HAM terhadap masyarakat suku asli ternyata masih terjadi di negara tersebut. Lambatnya respon Pemerintah Kanada terhadap permasalahan HAM ini membuat Organisasi-organisasi *Indigenous* bergerak

³ "ICJR," ICJR, accessed July 30, 2021, <https://icjr.or.id/>.

⁴ "OHCHR | Home," accessed July 29, 2021, <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>.

⁵ "United Nations Foundation | Helping the UN Build a Better World.," unfoundation.org, accessed July 30, 2021, <https://unfoundation.org/>.

⁶ "Indigenous Organizations | Indigenous Works," accessed July 30, 2021, <https://indigenousworks.ca/en/resources/indigenous-organizations>.

⁷ "The Canadian Press | Canada's Trusted News Leader," accessed July 30, 2021, <https://www.thecanadianpress.com/>.

dalam mengatasi permasalahan *The Missing and Murdered Indigenous Women and Girls* (MMIWG).⁸ Organisasi-organisasi ini melakukan berbagai cara untuk mengatasi MMIWG. Berbagai cara ini akhirnya berhasil membuat Pemerintah Kanada melakukan penyelidikan nasional terkait MMIWG dan menghasilkan 231 rekomendasi untuk pemerintah Kanada yang bernama “231 Calls for Justice”.

Peranan organisasi-organisasi *indigenous* dalam mengatasi permasalahan *The Missing and Murdered Indigenous Women and Girls* (MMIWG) di Kanada membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **Kontribusi Organisasi Indigenous Nasional dalam Menangani Permasalahan *Missing and Murdered Indigenous Women and Girls* (MMIWG) di Kanada.**

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang dilakukan dan digunakan oleh penulis pada karya tulis ini adalah data sekunder (Secondary Data). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan pihak lain dan bukan dengan pengamatan secara langsung. Hal ini membuat penulis tidak berinteraksi secara langsung dengan objek yang akan diteliti. Metode ini dapat disebut sebagai studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data yang valid maka penulis menggunakan data dari Perpustakaan Universitas Jember dan Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dengan membaca berbagai macam literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Literature tersebut berupa media cetak, internet, jurnal, laporan, buku, dan buku elektronik (e-book). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Metode ini berfokus pada suatu masalah sehingga prosesnya tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mengolah data. Penulis dituntut untuk dapat meneliti, menganalisis, menginterpretasikan, menjelaskan serta membuat kesimpulan masalah suatu fenomena. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menyusun karya ilmiah secara sistematis sehingga isi dari karya ilmiah yang dibuatnya dapat dipahami dan bermanfaat.

⁸ “Human Rights Program,” accessed July 30, 2021,

https://www.cartercenter.org/peace/human_rights/index.html?s_src=peace&s_subsrc=search&gclid=CjwKCAjwXo6lBhBKEiwAXSYBs7cGoU1Mi9JwTEDuAGJaG6szZGMvaivc-uuV5rYnOyxWPF2hIDjyohoCDQQQAvD_BwE.

Kerangka Konseptual

Pada penulisan karya tulis ilmiah khususnya skripsi, kerangka konseptual dan teori dibutuhkan untuk dijadikan sebagai instrument yang dibutuhkan penulis untuk menganalisis dan melakukan penelitian. Hasilnya penulis dapat memberikan jawaban yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan, teori adalah suatu himpunan pengertian yang saling berkaitan, batasan, dan proporsi yang menyajikan pandangan sistematis tentang gejala-gejala dengan jalan menetapkan hubungan yang ada di antara variabel-variabel, dan dengan tujuan untuk menjelaskan gejala-gejala tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Konsep Humanitarian Non-Governmental Organizations (HRNGOs).

Konsep Non-Governmental Organizations (NGOs)

Kajian-kajian mengenai international regime khususnya peranan aktor non-negara dalam menyelesaikan suatu isu sekarang menjadi tren dalam kajian-kajian hubungan internasional. Salah satu aktor non-negara tersebut yakni Non-Governmental Organizations (NGOs). Istilah NGO telah digunakan sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdiri pada tahun 1945. PBB mendefinisikan NGOs sebagai organisasi non-profit serta voluntary yang terorganisir pada skala level lokal, nasional maupun internasional. PBB lebih lanjut lagi menjelaskan bahwa NGOs melakukan berbagai variasi pelayanan dan fungsi humanitarian, membawa isu kepada pemerintah, melakukan monitoring kebijakan, dan mendorong partisipasi politik pada level komunitas. Isu-isu yang biasanya dibawa oleh NGOs adalah Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan, serta kesehatan.⁹

Berdasarkan aktivitas utamanya, NGOs dibagi menjadi dua kategori, yakni operasional dan advokasi. Pertama, operasional, pada kategori ini NGOs menyediakan barang dan jasa yang kritis bagi mereka yang membutuhkan. Kedua, advokasi, NGOs ini bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh NGOs dalam menjalankan aktivitas advokasinya. Beberapa cara tersebut yakni melakukan lobi, berperan sebagai penasehat, mengadakan

⁹ J. Clark, "Democratizing Development," 1991, <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XF2016039296>.

penelitian terhadap suatu isu, memonitoring suatu isu atau tindakan aktor lain, memperluas informasi, dan membentuk agenda.¹⁰

NGOs melakukan berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan, membawa permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kehadapan pemerintah, dan mendorong partisipasi politik di tingkat komunitas. NGOs juga memainkan peranan kritis dalam mengembangkan masyarakat, meningkatkan komunitas dan mempromosikan partisipasi masyarakat. Bersama dengan organisasi internasional, NGOs mendukung dan melindungi hak-hak pekerja, anak-anak, indigenous peoples, petani kecil, pekerja migran, kelompok minoritas, homoseksual, wanita, para tahanan dan hewan yang terancam punah.¹¹

NGOs memiliki peranan penting dalam memastikan penegakkan HAM. Hal ini tertuang dalam deklarasi Wina poin 39 yang menyatakan bahwa:

peran penting NGOs dalam mempromosikan semua HAM dan dalam kegiatan kemanusiaan pada tingkat nasional, regional, dan internasional ... untuk mempromosikan serta melindungi semua HAM dan kebebasan fundamental.¹²

Melalui hal ini munculah Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs). NGOs ini berfokus pada penyelesaian isu-isu mengenai HAM yang ada di suatu negara.¹³

Penulis menggunakan konsep ini untuk menjelaskan bahwa organisasi indigenous nasional yang ada di Kanada merupakan Non-Governmental Organizations. Organisasi Indigenous Nasional di Kanada merupakan organisasi non-profit yang bekerja pada skala lokal dan membawa isu mengenai HAM, hak asasi masyarakat suku asli dan krisis MMIWG, pada level pemerintah. Hal ini sesuai dengan pengertian NGOs menurut PBB. Organisasi Indigenous Nasional di Kanada merupakan aktor non-negara yang dapat dikategorikan sebagai NGOs Advokasi. Organisasi-organisasi ini bekerja sebagai representasi masyarakat suku asli yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. Organisasi Indigenous Nasional di Kanada berjuang untuk menegakkan hak asasi masyarakat suku asli di Kanada yang

¹⁰ "The Role of NGOs under Authoritarian Political Systems | S. Cleary | Palgrave Macmillan," accessed July 30, 2021, <https://www.palgrave.com/gp/book/9780312174644>.

¹¹ "Korten - 1980 - Community Organization and Rural Development A Le.Pdf," accessed July 30, 2021, http://courses.washington.edu/pbaf531/Korten_LearningProcessApproach.pdf.

¹² Reeni Samuel and Dr V Thanikachalam, "NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGOS) SPEARHEADING PUBLIC PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL ISSUES," n.d., 14.

¹³ Samuel and Thanikachalam.

termaginalkan. Organisasi ini juga berfokus pada penyelesaian isu mengenai HAM. Oleh karena itu, Organisasi Indigenous Nasional di Kanada dapat diklasifikasikan sebagai Humanitarian Non-Governmental Organizations (HRNGOs).

Konsep Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs)

Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs) merupakan NGOs yang bergerak pada isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. HRNGOs bergerak dalam menegakkan serta melindungi HAM baik itu pada level nasional maupun internasional. Globalisasi menjadikan HRNGOs menjadi salah satu aktor non-negara yang paling berpengaruh dalam melakukan penegakan HAM. HRNGOs memiliki dua peranan, yakni sebagai human rights defenders dan state sovereignty destroyer.¹⁴

1. Human Rights Defenders

Beberapa pihak percaya bahwa kegiatan HRNGOs memperkuat kedaulatan negara dengan klaim bahwa mereka membantu negara untuk memenuhi fungsi dan kewajibannya berdasarkan hukum HAM. HRNGOs memprioritaskan isu-isu mengenai HAM, memonitoring komitmen negara dalam menangani isu HAM, menyoroti masalah yang ada di bidang HAM, dan membantu memastikan pemenuhan HAM sebagai mana mestinya. HRNGOs memberikan informasi mengenai situasi HAM di dalam negeri dan HAM secara global.¹⁵

Ada beberapa aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan peranan human rights defenders, yakni:¹⁶

a. Ikut serta dalam penetapan standar HAM

HRNGOs memainkan peranan sebagai kontributor dalam penetapan standar HAM sejak berakhirnya perang dunia II. Pada beberapa kasus HRNGOs disebut sebagai penginisiasi terbentuknya dokumen-dokumen HAM. Pada proses perumusan atau penyusunan, NGO sebagian besar bertindak sebagai pakar di isu-isu HAM tertentu.

Memantau situasi HAM

HRNGOs memantau situasi HAM di negara-negara tertentu di seluruh dunia. mereka bertindak sebagai pengawas dan memberikan tinjauan serta penilaian independen tentang

¹⁴ "OHCHR | Home," accessed July 30, 2021, <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>.

¹⁵ "The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?," accessed July 30, 2021, <https://sciendoc.com/article/10.2478/v10076-011-0012-5>.

¹⁶ "The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?"

penegakkan HAM. Monitoring tersebut membantu dalam mengumpulkan data tentang situasi HAM di tingkat nasional maupun internasional dan selanjutnya mampu menyoroti permasalahan HAM yang ada.

Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran HAM

HRNGOs memiliki peranan mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran HAM. Mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, misalnya dari para korban HAM, saksi-saksi, HRNGOs lainnya, surat kabar, memeriksa bukti fisik yang ada, maupun mengamati peradilan dan demonstrasi yang berlangsung. Dengan mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang isu-isu HAM, NGOs mencoba untuk menarik perhatian publik, pemerintah, dan aktor-aktor lain terhadap isu-isu HAM yang terjadi terutama pada isu yang biasanya tidak terdengar. Karena itulah penyelidikan, dokumentasi dan penyebaran informasi oleh HRNGOs memainkan peran penting dalam membawa isu pelanggaran HAM menjadi perhatian masyarakat luas.

b. Melakukan lobi untuk penegakan HAM yang efektif atau advokasi

Informasi yang dikumpulkan, diverifikasi dan disebarluaskan oleh HRNGOs adalah senjata utama mereka untuk melobi pemerintah agar mau mengubah kebijakan mereka yang berhubungan dengan HAM. Dalam memainkan peran advokasi, HRNGOs mencoba memengaruhi para politisi untuk membuat keputusan yang mendukung perlindungan HAM yang lebih baik dan lebih efektif.

Memberikan bantuan langsung kepada para korban pelanggaran HAM

Kehadiran HRNGOs bertujuan untuk memperbaiki situasi HAM. Mereka sering turun langsung membantu para korban HAM dengan memberikan mereka bantuan hukum (seperti menangani keluhan korban), bantuan kemanusiaan (seperti menyediakan bantuan darurat, makanan, air, tempat tinggal, obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya untuk perawatan rehabilitasi kesehatan korban) dan jenis bantuan langsung lainnya.

Bertindak sebagai konsiliator

Karena pengetahuan HRNGOs tentang situasi HAM dan reputasi ketidakberpihakan mereka, hal ini menyebabkan HRNGOs dalam beberapa kasus terlibat dalam proses rekonsiliasi dan mediasi. Biasanya mereka bertindak sebagai perantara yang netral secara politik, memfasilitasi negosiasi, dan membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

c. Memberikan pendidikan HAM

Memberikan pendidikan berkaitan dengan HAM berkontribusi dalam peningkatan situasi HAM itu sendiri, karena masyarakat belajar tentang hak-hak mereka sehingga mereka menjadi sadar untuk melindungi hak-hak mereka. HRNGOs menyebarkan informasi tentang HAM secara umum dan juga pada topik-topik tertentu dengan cara: mengadakan diskusi, menerbitkan publikasi, dan mengatur berbagai acara seperti seminar pada berbagai topik yang berkaitan dengan HAM. Dengan cara inilah NGOs meningkatkan kesadaran publik tentang HAM.

d. Raising Awareness, naming and shaming

Senjata terakhir yang juga efektif bagi HRNGOs dalam melindungi HAM adalah “mobilization of shame” atau menggunakan strategi “naming” dan “shaming”. Strategi ini bermaksud bahwa melalui pengumpulan dan penerbitan informasi tentang catatan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam suatu negara tertentu, akan mempermalukan pemerintah tersebut sehingga mampu mengubah perilaku pemerintah dan meningkatkan kepatuhannya terhadap standar HAM internasional. Strategi ini berangkat dari gagasan bahwa semua negara di dunia ingin dikenal sebagai negara yang beradab, yang mematuhi standar HAM internasional yang telah mereka ciptakan bersama. Jadi, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada kredibilitas informasi yang disediakan oleh HRNGOs. Penggunaan strategi naming and shaming tidak hanya dapat membawa perubahan positif di dalam negeri, tetapi juga dapat memobilisasi opini publik internasional terhadap negara yang melanggar, memimpin negara-negara lain atau organisasi antar pemerintah untuk mengambil tindakan, seperti kritik terbuka atau tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi terhadap negara yang melanggar untuk mengubah “praktik buruk” di dalam negaranya.

2. State Sovereignty Destroyer

Negara memiliki hak untuk memperlakukan warga negaranya sesuai dengan kehendak mereka terbebas dari tekanan internal maupun eksternal. Tetapi, partisipasi aktif HRNGOs dalam implementasi HAM telah mengganggu kesakralan ini. Negara mendukung gagasan tradisional tentang state sovereignty, yaitu bahwa negara “bukanlah subjek dari negara lain, dan memiliki kekuatan penuh serta eksklusif di dalam yurisdiksinya”. Dengan kata lain gagasan ini membatasi orang lain untuk campur tangan atau mengintervensi urusan-urusan dalam negeri suatu negara. Sementara HRNGOs menganggap kedaulatan bukan sebatas hak untuk tidak melakukan intervensi (kedaulatan negatif), tetapi sebagai tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi warga negaranya (kedaulatan positif). Perbedaan cara pandang ini

membuat peran HRNGOs dianggap mampu melemahkan kedaulatan negara atau berperan sebagai state sovereignty destroyer.¹⁷

Pada peranan State Sovereignty Destroyer, HRNGOs juga memiliki aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan dijalankan. Aktivitas tersebut yakni:¹⁸

a. Mengambil alih fungsi tradisional negara

Pelemahan kedaulatan negara terjadi saat HRNGOs berpartisipasi dalam fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh negara. Ketika HRNGOs memainkan peran yang penting dalam penyediaan layanan sosial sehingga HRNGOs memiliki kemampuan untuk memengaruhi kehidupan sosial masyarakat bukan hanya negara saja, maka dapat dikatakan kehadiran HRNGOs dapat melemahkan kapasitas dan legitimasi negara. Jadi jika HRNGOs memenuhi beberapa fungsi negara maka munculah keraguan tentang kedaulatan negara tersebut.¹⁹

b. Memantau kepatuhan negara terhadap hukum HAM internasional

Penerimaan sukarela terhadap konvensi HAM internasional membuat negara rentan terhadap tekanan untuk perubahan politik berkaitan dengan isu HAM. Pemantauan atau pemantauan yang konsisten membantu untuk mengungkapkan bagaimana negara mematuhi kewajibannya dibawah hukum HAM internasional yang terkadang membatasi otoritas dan kebebasan negara untuk bertindak.²⁰

c. Mengumpulkan dan menerbitkan informasi tentang pelanggaran HAM

HRNGOs juga dapat melemahkan otonomi dan legitimasi negara melalui pengumpulan dan publikasi laporan atau informasi lainnya mengenai pelanggaran HAM. Dengan melakukan hal tersebut mereka berusaha menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi HAM dan mengirimkan pesan kepada masyarakat dan komunitas internasional mengenai ketidakmampuan negara dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya dibawah hukum HAM. Hal ini membuat negara-negara lain memberikan tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi terhadap negara pelanggar HAM.²¹

¹⁷ "NGOs and Human Rights | Claude E. Welch, Jr.," accessed July 30, 2021, <https://www.upenn.edu/pennpress/book/13418.html>.

¹⁸ "The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?"

¹⁹ "The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?," 76.

²⁰ "The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?"

²¹ "The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?"

d. Mempengaruhi kebijakan HAM negara

Upaya yang dilakukan HRNGOs bertujuan untuk mengubah kebijakan HAM negara. Selain perkembangan teknologi telah membantu untuk mempermudah tujuan tersebut, advokasi yang berkaitan erat dengan lobi pada pengambil keputusan juga menjadi alat kunci agar pemerintah mengubah kebijakannya dan mendukung isu-isu yang ditangani oleh NGO.²²

e. Meminta negara bertanggung jawab atas kewajiban mereka dibawah hukum HAM

Kebijakan pemantauan yang dilakukan oleh HRNGOs adalah instrumen mereka untuk mengendalikan negara dalam menjamin dan mewujudkan HAM, dengan kata lain mereka bertindak sebagai "pengendali", meminta pertanggung jawaban negara atas kewajiban mereka di bawah instrumen HAM internasional.

f. Mengkritisi otoritas negara

Beberapa upaya HRNGOs yang disebutkan sebelumnya belum menjadi tantangan yang cukup serius terhadap kedaulatan. Secara resmi negara masih merupakan otoritas tertinggi di wilayahnya, tetapi sekarang terdapat cara untuk mengakali otoritas negara tersebut.

g. Menekan negara untuk bertindak memenuhi tanggung jawabnya

Pemerintah nasional yang menandatangani dan meratifikasi konvensi/deklarasi HAM yang mengikat diwajibkan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan domestik sesuai dengan kewajiban yang diterima. Dalam hal ini HRNGOs yang aktif dan berkuasa bisa melemahkan kedaulatan negara dengan menekan negara untuk mematuhi standar HAM dalam melakukan urusan internal dan internasional mereka dan untuk menegakkan perlindungan

h. HAM ketingkat yang lebih tinggi.

Dari penjelasan teori diatas, penulis menggunakan konsep ini dengan berfokus kepada dua peran penting HRNGOs yaitu sebagai State Sovereignty Destroyer dan Human Rights Defender untuk menganalisis kontribusi Organisasi Indigenous Nasional di Kanada, yang merupakan sebuah HRNGOs, dalam mengatasi permasalahan MMIWG. Alasan penulis menggunakan konsep ini karena adanya kesesuaian dengan penelitian ini. Dengan menggunakan kedua peran tersebut, penulis dapat menganalisis kontribusi dari organisasi-organisasi Indigenous Nasional di Kanada. Konsep tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis apakah benar terjadi kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian kasus MMIWG atau tidak.

²² "The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?"

Konsep Feminisme Liberal

Feminisme liberal, adalah cabang utama feminisme yang didefinisikan oleh fokusnya pada pencapaian kesetaraan gender melalui reformasi politik dan hukum dalam kerangka demokrasi liberal. Sebagai aliran pemikiran feminis tertua, feminisme liberal berakar pada feminisme gelombang pertama abad ke-19 yang berfokus terutama pada hak pilih perempuan dan akses ke pendidikan, dan yang dikaitkan dengan liberalisme dan progresivisme abad ke-19. Feminisme liberal memiliki fokus yang kuat pada reformasi politik dan hukum yang bertujuan untuk memberikan perempuan hak dan kesempatan yang sama. Feminis liberal berpendapat bahwa masyarakat memegang keyakinan yang salah bahwa perempuan pada dasarnya kurang mampu secara intelektual dan fisik daripada laki-laki; sehingga cenderung mendiskriminasi perempuan di akademi, forum, dan pasar. Feminis liberal percaya bahwa subordinasi perempuan berakar pada serangkaian batasan adat dan hukum yang menghalangi masuknya perempuan ke dan keberhasilan dalam apa yang disebut dunia publik, dan berjuang untuk kesetaraan gender melalui reformasi politik dan hukum. Kaum liberal lainnya memahami kebebasan sebagai otonomi pribadi menjalani kehidupan yang dipilih sendiri dan otonomi politik menjadi penulis bersama kondisi di mana seseorang hidup.²³

Jagger menggambarkan feminisme liberal sebagai teori dan karya yang lebih berkonsentrasi pada isu-isu seperti kesetaraan di tempat kerja, dalam pendidikan, dan hak-hak politik. Feminisme liberal juga berfokus pada bagaimana kehidupan pribadi menghambat atau meningkatkan kesetaraan publik. Dengan demikian, feminis liberal cenderung mendukung pernikahan sebagai kemitraan yang setara, dan lebih banyak keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan anak. Dukungan untuk aborsi dan hak-hak reproduksi lainnya berkaitan dengan kontrol hidup dan otonomi seseorang. Mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual menghilangkan hambatan bagi perempuan untuk mencapai tingkat yang setara dengan laki-laki. Tujuan utama feminisme liberal adalah kesetaraan gender di ruang publik, seperti akses yang sama ke pendidikan, upah yang sama, mengakhiri pemisahan jenis kelamin pekerjaan, dan

²³ Alexandra Wettlaufer, "Josephine Donovan. *Feminist Theory: The Intellectual Traditions*. Fourth Edition. New York: Continuum, 2012. Xvi + 287 Pp.," *Studies in 20th & 21st Century Literature* 38 (January 1, 2014), <https://doi.org/10.4148/2334-4415.1013>.

kondisi kerja yang lebih baik. Dari sudut pandang ini, perubahan hukum akan memungkinkan tujuan ini. Meskipun tidak dapat disangkal mungkin ada perbedaan berbasis biologis antara pria dan wanita, feminisme liberal tidak dapat melihat perbedaan ini sebagai pembenaran yang memadai untuk ketidaksetaraan, seperti kesenjangan upah antara pria dan wanita.²⁴

Hasil Penelitian

Menggunakan konsep Non-Governmental Organizations (NGOs) dan konsep Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs), skripsi ini berargumen bahwa terdapat dua peranan mereka sebagai State Sovereignty Destroyer dan Human Rights Defender yang mempengaruhi yakni dengan melakukan berbagai macam kampanye terkait kasus missing and murdered indigenous women and girls (MMIWG), membentuk koalisi dengan NGO lain di Kanada, melakukan penelitian dan pengumpulan informasi terhadap kasus missing and murdered indigenous women and girls (MMIWG), dan membuat berbagai macam project terkait missing and murdered indigenous women and girls (MMIWG). Kontribusi-kontribusi yang mereka lakukan, mampu memperluas informasi mengenai MMIWG pada masyarakat lokal dan internasional sehingga muncul dorongan terhadap Pemerintah Kanada untuk segera melakukan tindakan penyelesaian terhadap permasalahan MMIWG.

Berperan Sebagai Human Rights Defenders

Human rights defenders merupakan fungsi atau peran HRNGOs dalam memperkuat kedaulatan negara dengan klaim bahwa mereka membantu negara untuk memenuhi fungsi dan kewajibannya berdasarkan hukum HAM. HRNGOs memprioritaskan isu-isu mengenai HAM, memonitoring komitmen negara dalam menangani isu HAM, menyoroti masalah yang ada di bidang HAM, dan membantu memastikan pemenuhan HAM sebagai mana mestinya. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan peranan human rights defenders, yakni HRNGOs memantau situasi HAM, memberikan bantuan langsung kepada para korban pelanggaran HAM, memberikan pendidikan HAM, raising Awareness, naming dan shaming serta memberikan informasi mengenai situasi HAM di dalam negeri dan HAM secara.²⁵

²⁴ Alison M Jaggar, *Feminist Politics and Human Nature* (Totowa, N.J.: Rowman & Allanheld, 1983).

²⁵ "NGOs and Human Rights | Claude E. Welch, Jr.," accessed July 30, 2021, <https://www.upenn.edu/pennpress/book/13418.html>.

Missing and murdered indigenous women and girls (MMIWG) mengacu pada krisis hak asasi manusia yang menjadi topik diskusi di media nasional. Wanita dan komunitas adat, kelompok wanita dan organisasi internasional telah lama menyerukan tindakan atas tingkat kekerasan yang tinggi yang dialami oleh para wanita dan gadis pribumi yang hilang dan terbunuh di Kanada. Sebelum penyelidikan publik nasional diluncurkan pada 8 Desember 2015, seruan ini terus-menerus diabaikan oleh pemerintah federal. Menurut Dawn Lavell-Harvard, mantan presiden Asosiasi Wanita Pribumi Kanada, menyebut MMIWG sebagai tragedi nasional dan aib nasional. Pada 2015, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada mendukung seruan untuk penyelidikan publik nasional terhadap viktimisasi yang tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan pribumi.²⁶

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pribumi bersifat sistemik dan merupakan krisis nasional yang membutuhkan tindakan darurat, terinformasi dan kolaboratif. Data publik terkini tentang MMIWG terlalu menyederhanakan dan tidak menggambarkan skala masalah, namun masih menunjukkan pola kekerasan yang kompleks dan meluas terhadap perempuan dan anak perempuan adat yang sering menjadi sasaran karena gender dan identitas pribumi mereka. Tinjauan Operasional RCMP 2014 mencatat bahwa polisi mencatat 1.017 insiden pembunuhan wanita Aborigin antara tahun 1980 dan 2012 dan 164 investigasi wanita Aborigin yang hilang sejak tahun 1952. Ada sejumlah laporan yang menunjukkan jumlahnya jauh lebih tinggi. Dari 2001 hingga 2014, rata-rata kasus pembunuhan yang melibatkan perempuan pribumi empat kali lebih tinggi dibandingkan pembunuhan yang melibatkan perempuan non penduduk asli.²⁷

Ada banyak ketidaksepakatan tentang jumlah perempuan dan gadis pribumi yang hilang dan terbunuh di Kanada. Royal Canadian Mounted Police (RCMP) mengakui dalam laporan tahun 2014 bahwa ada lebih dari 1.200 perempuan Pribumi yang hilang dan dibunuh antara tahun 1980 dan 2012. Namun, komunitas kelompok perempuan pribumi mendokumentasikan jumlah orang yang hilang dan dibunuh lebih dari 4.000. Kebingungan tentang jumlah tersebut berkaitan dengan kurangnya pelaporan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pribumi dan kurangnya database yang efektif, serta kegagalan untuk mengidentifikasi kasus-kasus

²⁶ "Profile of Indigenous Canada: Trends and Data Needs | Linking Indigenous Communities with Regional Development in Canada | OECD ILibrary," accessed July 30, 2021, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e6cc8722-en/index.html?itemId=/content/component/e6cc8722-en>.

²⁷ Statistics Canada Government of Canada, "Victimization of Aboriginal People in Canada, 2014," June 28, 2016, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14631-eng.htm>.

tersebut berdasarkan etnis. Menurut data dari Native Women's Association of Canada (NWAC) perempuan yang berasal dari suku asli yang berusia 15 tahun ke atas 3,5 kali lebih mungkin mengalami kekerasan dibandingkan perempuan lainnya. Menurut Survei Sosial Umum Tahun 2004, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pribumi tidak hanya lebih sering tetapi juga lebih parah. Antara tahun 1997 dan 2000, tingkat pembunuhan perempuan pribumi hampir tujuh kali lebih tinggi daripada tingkat pembunuhan perempuan non-Pribumi.²⁸

Native Women's Association of Canada (NWAC)

Native Women's Association of Canada (NWAC) adalah National Indigenous Organization yang mewakili suara politik wanita, anak perempuan, dan orang-orang yang beragam gender di Kanada. Sebuah kumpulan organisasi perempuan Pribumi dari seluruh negeri, NWAC didirikan memiliki tujuan kolektif untuk meningkatkan, mempromosikan, dan membina kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya dan politik perempuan Pribumi dalam komunitas mereka masing-masing di Kanada.²⁹

Salah satu proyek utama NWAC adalah mengakhiri kekerasan terhadap perempuan pribumi. NWAC berpartisipasi atau membuat berbagai acara untuk mengenang wanita dan gadis pribumi yang hilang dan dibunuh (MMIWG), seperti pada tanggal 4 Oktober 2006, para suster pertama yang menyalakan lilin di Spirit Vigils diadakan di Vancouver, B.C., untuk menghormati ingatan akan wanita dan gadis pribumi yang hilang dan terbunuh. Sejak 2006, kegiatan menyalakan lilin telah diselenggarakan tiap tahun setiap tanggal 4 Oktober. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2010, NWAC menciptakan Hari "Pengetahuan untuk Bertindak". Nama acara tersebut tujuan utamanya adalah untuk bertukar pengetahuan tentang wanita dan gadis pribumi yang hilang dan dibunuh. Dalam kegiatan ini, NWAC mengundang pakar subjek (peneliti, pembuat kebijakan, dan anggota masyarakat) untuk berdiskusi tentang permasalahan terkait MMIWG, dengan tujuan untuk bergerak maju.³⁰

Native Women's Association of Canada (NWAC) mendapatkan dana pada tahun 2005 dari Status of Women Canada untuk penelitian dan memberikan kesadaran tentang kekerasan

²⁸ Government of Canada.

²⁹ "MMIWG Report Calls on Canadians to Act: Here's How to Make an Impact | CBC News," accessed July 30, 2021, <https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/mmiwg-racism-final-report-actions-1.5163245>.

³⁰ "MMIWG Report Calls on Canadians to Act: Here's How to Make an Impact | CBC News."

terhadap perempuan Pribumi. Dengan dana ini, lahirlah Sisters in Spirit Initiative. NWAC juga mengembangkan database nasional untuk melacak kasus kekerasan terhadap perempuan pribumi. Karya mereka memuncak dalam laporan akhir berjudul *What They Stories Tell Us: Research Findings from the Sisters in Spirit Initiative*.³¹

Assembly of First Nations (AFN)

Tujuan utama dari Assembly of First Nations (AFN) adalah untuk mendesak penegakan hak pemerintahan sendiri bagi bangsa pribumi dalam Konstitusi Kanada. Ketika gugus tugas parlementer tentang Pemerintahan Sendiri Bangsa Pertama dibentuk pada tahun 1982, Komite Khusus House of Commons tentang Pemerintahan Sendiri Indian, AFN diundang untuk memiliki anggota *ex-official non-voting* yang bekerja dengan para anggota parlemen di komite. AFN juga terlibat dalam diskusi konstitusional tahun 1980-an.

Hasil dari Undang-Undang Konstitusi tahun 1982, dibuat untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan hak-hak Aborigin. AFN mewakili komunitas First Nations di FMCs tahun 1983, 1984, 1985 dan 1987. Namun, posisi yang diambil oleh pemerintah federal dan provinsi mempersulit AFN untuk mempertahankan posisi tersebut. Dalam 11 Perjanjian (ditandatangani antara tahun 1871 dan 1921) Bangsa-bangsa Pertama menyerahkan sebidang tanah yang luas di Ontario utara, Prairies, dan sebagian British Columbia dan wilayahnya dengan imbalan tidak hanya untuk penyelesaian tunai, tetapi juga untuk serangkaian kewajiban yang kompleks dari pemerintah federal, termasuk pembentukan cadangan, anuitas, dan hak berburu dan memancing. Oleh karena itu, negara-negara Perjanjian tersebut memiliki hubungan perjanjian eksplisit dengan pemerintah federal, tidak seperti banyak Bangsa Pertama lainnya, yang klaimnya didasarkan pada konsep yang lebih umum tentang Hak Aborigin yang melekat pada suatu tanah atau wilayah.³²

Congress of Aboriginal Peoples (CAP)

Kongres Masyarakat Aborigin (CAP) adalah organisasi politik nasional yang mengadvokasi atas nama hak dan kepentingan orang India yang memiliki status dan non-status, Métis dan Inuit

³¹ "No More Stolen Sisters | Amnesty International Canada," accessed July 30, 2021, <https://www.amnesty.ca/our-work/campaigns/no-more-stolen-sisters>.

³² "Assembly of First Nations | The Canadian Encyclopedia," accessed July 30, 2021, <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/assembly-of-first-nations>.

Selatan dari Labrador yang tinggal di daerah perkotaan, pedesaan, terpencil di Kanada. Kongres ini juga merupakan suara nasional untuk organisasi afiliasinya di seluruh Kanada. Kongres Masyarakat Aborigin (CAP) terus mengadvokasi penerapan langkah-langkah Pribumi yang efektif untuk menangani dan memberantas kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Pribumi. Inisiatif proyek berikut adalah bagian dari upaya CAP untuk advokasi tersebut: *Walking In Her Moccasins Bundle*.³³

CAP dan White Ribbon mulai berkolaborasi pada Januari 2016 untuk mengimplementasikan inisiatif multi-tahun untuk melibatkan laki-laki Pribumi, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menanggapi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan Pribumi. Proyek ini berakar pada hak perempuan dan anak perempuan Pribumi untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan, dan mendorong laki-laki dan anak laki-laki Pribumi untuk memainkan peran yang positif dan relevan secara budaya untuk mempromosikan kesetaraan gender. Kongres Masyarakat Aborigin mengakui dampak kolonialisme pada komunitas Pribumi, dan melalui kegiatan ini menawarkan latihan berbasis penyembuhan, khusus untuk komunitas Pribumi, yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Sementara kegiatan ini diarahkan pada keterlibatan dengan komunitas Pribumi, diharapkan sumber daya ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan, anak perempuan, laki-laki dan laki-laki non-Pribumi tentang keragaman dan keindahan budaya Pribumi.³⁴ Selain kegiatan *walking in her Moccasins bundle*, CAP juga memprakarsai adanya *The Miykiwan Toolkit*. Perangkat *Miykiwan* adalah hasil dari upaya banyak orang yang datang bersama dengan hati terbuka dan pikiran terbuka untuk membantu meningkatkan kehidupan keluarga Aborigin yang tinggal di Kanada.

Metis National Council (MNC)

Dewan Nasional Métis adalah badan perwakilan masyarakat Métis di Kanada. MNC mewakili Bangsa Métis baik secara nasional maupun internasional, menerima arahan dari kepemimpinan

³³ Vincent Raynauld, Emmanuelle Richez, and Katie Boudreau Morris, "Canada Is #IdleNoMore: Exploring Dynamics of Indigenous Political and Civic Protest in the Twitterverse," *Information, Communication & Society* 21, no. 4 (April 3, 2018): 626–42, <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1301522>.

³⁴ "No More Stolen Sisters | Amnesty International Canada."

terpilih dari pemerintah tingkat provinsi Bangsa Métis. Tujuan dari MNC adalah untuk mengamankan keberadaan Bangsa Métis dalam federasi Kanada.³⁵

MNC membuat sebuah laporan yang membahas mengenai kebutuhan untuk mencari solusi atas pelanggaran tragis terhadap perempuan dan gadis Pribumi dengan pendekatan berbasis toleransi keberagaman. Dalam laporan tersebut mengatakan siapa pun dapat mengidentifikasi diri sebagai Métis, bahwa tidak ada tanah air geografis Métis yang ditentukan dan menyiratkan bahwa kami tidak memiliki pemerintah, atau hak apa pun yang ditetapkan. Dalam Métis-Specific Calls for Justice, Bangsa Metis ditangani hanya dalam hal individu yang masalahnya dapat ditangani melalui program dan layanan inisiatif sosial-ekonomi dan sosial-budaya, sebuah pendekatan yang dicoba oleh pemerintah federal pada tahun 1970-an dan 80-an.

Seiring dengan beberapa kemenangan hukum utama yang menegaskan dan memperluas hak Métis telah muncul perdebatan baru tentang klaim tanah dan pemerintahan sendiri Métis. Sejak 2010, MNC telah bekerja untuk membuat konstitusi sebagai dasar pemerintahan sendiri, yang mencakup proposal kepada Pemerintah Kanada untuk devolusi beberapa kekuasaan (bersama dengan pendanaan federal) ke institusi Métis nasional dan provinsi.

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)

Inuit Tapiriit Kanatami (sebelumnya dikenal sebagai Eskimo Brotherhood of Canada) adalah organisasi advokasi nasional yang mempromosikan kesadaran tentang masalah politik, sosial, budaya, dan lingkungan yang berdampak pada komunitas Inuit, dari Daerah Permukiman Inuvialuit di Wilayah Barat Laut, hingga Nunavut, Nunavik di Québec Utara, Nunatsiavut di Labrador Utara.³⁶

Konferensi tahunan pertama organisasi ini diadakan di Pangnirtung pada tahun 1972. Sejak didirikan, Inuit Tapiriit Kanatami telah menganjurkan untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa, budaya, dan warisan Inuit, memberikan focal point untuk menentukan kebutuhan dan keinginan semua orang Inuit, mewakili Inuit tentang hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, meningkatkan komunikasi ke dan antar komunitas Inuit, memasukkan hak pemerintahan mandiri yang melekat pada masyarakat Aborigin dalam Konstitusi Kanada,

³⁵ "Métis National Council | The Canadian Encyclopedia," accessed July 30, 2021, <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/metis-national-council>.

³⁶ "Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) | The Canadian Encyclopedia," accessed July 30, 2021, <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/inuit-tapiriit-kanatami-itk>.

menjamin dan melindungi hak asasi manusia dalam semua aspek kehidupan Inuit, melindungi lingkungan, memfasilitasi perencanaan dan pembangunan ekonomi yang memungkinkan partisipasi, kontrol dan swasembada Inuit, menangani masalah kesehatan dan sosial, mengupayakan perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, budaya dan sosial orang Inuit melalui instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri.³⁷

Berperan Sebagai State Sovereignty Destroyer

Negara mendukung gagasan tradisional tentang state sovereignty, yaitu bahwa negara “bukanlah subjek dari negara lain, dan memiliki kekuatan penuh serta eksklusif didalam yurisdiksinya”. Dengan kata lain gagasan ini membatasi orang lain untuk campur tangan atau mengintervensi urusan-urusan dalam negeri suatu negara.³⁸ Sementara HRNGOs menganggap kedaulatan bukan sebatas hak untuk tidak melakukan intervensi (kedaulatan negatif), tetapi sebagai tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi warga negaranya (kedaulatan positif). Perbedaan cara pandang ini membuat peran HRNGOs dianggap mampu melemahkan kedaulatan negara atau berperan sebagai state sovereignty destroyer.³⁹ Pada peranan State Sovereignty Destroyer, HRNGOs juga memiliki aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan dijalankan. Aktivitas tersebut yakni, Memantau kepatuhan negara terhadap hukum HAM internasional, Mengumpulkan dan menerbitkan informasi tentang pelanggaran HAM, Mempengaruhi kebijakan HAM negara, Meminta negara bertanggung jawab atas kewajiban mereka dibawah hukum HAM dan Menekan negara untuk bertindak memenuhi tanggung jawabnya.⁴⁰

Pada bulan Oktober 2004, amnesti internasional merilis sebuah laporan berjudul *Stolen Sisters: A Human Rights Response to Discrimination and Violence against Indigenous Women di Kanada*, sebagai tanggapan atas jumlah korban perempuan pribumi yang menjadi korban kekerasan rasial dan seksual. Laporan ini diposisikan sebagai ajakan untuk bertindak. Amnesti ini menyoroti kisah sembilan wanita, termasuk Helen Betty Osborne (seorang wanita yang diculik

³⁷ “ITK Continues to Advance Full Implementation of MMIWG Calls for Justice — Inuit Tapiriit Kanatami,” accessed July 30, 2021, <https://www.itk.ca/itk-continues-to-advance-full-implementation-of-mmiwg-calls-for-justice/>.

³⁸ “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?”

³⁹ “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?”

⁴⁰ “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?”

dan dibunuh pada usia 19 tahun oleh empat pria kulit putih di The Pas, Manitoba, pada tahun 1971) dan sepupunya yang berusia 16 tahun Felicia Solomon, yang jenazahnya ditemukan di Sungai Merah pada tahun 2003. Amnesti ini berbagi beberapa cerita tentang orang hilang dan dibunuh untuk memperjelas beratnya kekerasan yang dihadapi oleh perempuan pribumi.

Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang kontribusi Organisasi Indigenous Nasional dalam mengatasi permasalahan Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG) di Kanada. Dengan menggunakan konsep Non-Governmental Organizations (NGOs) dan konsep Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs), skripsi ini berargumen bahwa organisasi Indigenous Nasional di Kanada sebagai HRNGOs mempunyai kontribusi yang signifikan dalam mengatasi permasalahan MMIWG. Kontribusi Organisasi Indigenous Nasional di Kanada ini dilaksanakan sesuai dengan peranan mereka sebagai State Sovereignty Destroyer dan Human Rights Defender, yakni dengan melakukan berbagai macam kampanye terkait kasus MMIWG, membentuk koalisi dengan NGO lain di Kanada, melakukan penelitian dan pengumpulan informasi terhadap kasus MMIWG, dan membuat berbagai macam project terkait MMIWG. Kontribusi-kontribusi yang mereka lakukan, mampu memperluas informasi mengenai MMIWG pada masyarakat lokal dan internasional sehingga muncul dorongan terhadap Pemerintah Kanada untuk segera melakukan tindakan penyelesaian terhadap permasalahan MMIWG.

Bibliography

“Assembly of First Nations | The Canadian Encyclopedia.” Accessed July 30, 2021.
<https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/assembly-of-first-nations>.

Clark, J. “Democratizing Development,” 1991. <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XF2016039296>.

Government of Canada, Statistics Canada. “Victimization of Aboriginal People in Canada, 2014,” June 28, 2016. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14631-eng.htm>.

“Human Rights Program.” Accessed July 30, 2021.
https://www.cartercenter.org/peace/human_rights/index.html?s_src=peace&

s_subsrc=search&gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs7cGoU1Mi9JwTEDuAG
JaG6szZGMvaivc-uuV5rYnOyxWPf2hlDjyohoCDQQQAvD_BwE.

ICJR. "ICJR." Accessed July 30, 2021. <https://icjr.or.id/>.

"Indigenous Organizations | Indigenous Works." Accessed July 30, 2021.
<https://indigenousworks.ca/en/resources/indigenous-organizations>.

"Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) | The Canadian Encyclopedia." Accessed July 30, 2021.
<https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/inuit-tapiriit-kanatami-itk>.

"ITK Continues to Advance Full Implementation of MMIWG Calls for Justice – Inuit Tapiriit Kanatami." Accessed July 30, 2021. <https://www.itk.ca/itk-continues-to-advance-full-implementation-of-mmiwg-calls-for-justice/>.

Jaggar, Alison M. *Feminist Politics and Human Nature*. Totowa, N.J.: Rowman & Allanheld, 1983.

"Korten - 1980 - Community Organization and Rural Development A Le.Pdf." Accessed July 30, 2021.
http://courses.washington.edu/pbaf531/Korten_LearningProcessApproach.pdf.

"Métis National Council | The Canadian Encyclopedia." Accessed July 30, 2021.
<https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/metis-national-council>.

"MMIWG Report Calls on Canadians to Act: Here's How to Make an Impact | CBC News." Accessed July 30, 2021. <https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/mmiwg-racism-final-report-actions-1.5163245>.

"NGOs and Human Rights | Claude E. Welch, Jr." Accessed July 30, 2021.
<https://www.upenn.edu/pennpress/book/13418.html>.

"NGOs and Human Rights | Claude E. Welch, Jr." Accessed July 30, 2021.
<https://www.upenn.edu/pennpress/book/13418.html>.

“No More Stolen Sisters | Amnesty International Canada.” Accessed July 30, 2021.
<https://www.amnesty.ca/our-work/campaigns/no-more-stolen-sisters>.

“OHCHR | Home.” Accessed July 29, 2021. <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>.

“OHCHR | Home.” Accessed July 29, 2021. <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>.

“OHCHR | Home.” Accessed July 30, 2021. <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>.

“Profile of Indigenous Canada: Trends and Data Needs | Linking Indigenous Communities with Regional Development in Canada | OECD ILibrary.” Accessed July 30, 2021.
<https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e6cc8722-en/index.html?itemId=/content/component/e6cc8722-en>.

Raynauld, Vincent, Emmanuelle Richez, and Katie Boudreau Morris. “Canada Is #IdleNoMore: Exploring Dynamics of Indigenous Political and Civic Protest in the Twittersverse.” *Information, Communication & Society* 21, no. 4 (April 3, 2018): 626–42. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1301522>.

Samuel, Reeni, and Dr V Thanikachalam. “NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGOS) SPEARHEADING PUBLIC PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL ISSUES,” n.d., 14.

“The Canadian Press | Canada’s Trusted News Leader.” Accessed July 30, 2021.
<https://www.thecanadianpress.com/>.

“The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?” Accessed July 30, 2021. <https://sciendo.com/article/10.2478/v10076-011-0012-5>.

“The Role of NGOs under Authoritarian Political Systems | S. Cleary | Palgrave Macmillan.” Accessed July 30, 2021.
<https://www.palgrave.com/gp/book/9780312174644>.

unfoundation.org. “United Nations Foundation | Helping the UN Build a Better World.” Accessed July 30, 2021. <https://unfoundation.org/>.

Wettlaufer, Alexandra. "Josephine Donovan. Feminist Theory: The Intellectual Traditions. Fourth Edition. New York: Continuum, 2012. Xvi + 287 Pp." *Studies in 20th & 21st Century Literature* 38 (January 1, 2014). <https://doi.org/10.4148/2334-4415.1013>.

